

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG



**NO. 13**

**2011**

**SERI. A**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 13 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

**TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

Dan

**BUPATI KARAWANG**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2010.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah Kabupaten Karawang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Karawang dengan persetujuan bersama Bupati Karawang.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut penyertaan modal pemerintah daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan / atau Perseroan Terbatas lainnya.
9. Penyertaan Modal (Investasi) Permanen adalah penyertaan modal yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
10. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya yang selanjutnya disingkat PD. BPR BKPD Cilamaya adalah Perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Karawang bergerak dalam bidang jasa perbankan.
11. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD. PK adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat merupakan Lembaga keuangan mikro yang bergerak dibidang jasa keuangan non bank.
12. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang selanjutnya disebut PT. Bank Jabar Banten adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan pemerintah Propinsi Banten bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### Pasal 2

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk memenuhi modal dasar yang wajib disetor dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada :

1. PD. BPR BKPD Cilamaya;
2. PD. PK Karawang;
3. PD. PK Ciampel;
4. PD. PK Tirtamulya;
5. PD. PK Majalaya;
6. PD. PK Cibuaya;
7. PD. PK Jayakarta;
8. PD. PK Tirtajaya;
9. PD. PK Pakisjaya;
10. PD. PK Kutawaluya;
11. PT. Bank Jabar Banten Cabang Karawang;
12. PDAM Karawang.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2010 adalah penyertaan modal permanen sebesar Rp. 4.160.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

<b>NO.</b>	<b>PERUSAHAAN</b>	<b>JUMLAH (Rp.)</b>
1.	PD. BPR BKPD	200.000.000,-
2.	PD. PK Karawang	180.000.000,-
3.	PD. PK Ciampel	150.000.000,-
4.	PD. PK Tirtamulya	170.000.000,-
5.	PD. PK Majalaya	180.000.000,-
6.	PD. PK Cibuaya	150.000.000,-
7.	PD. PK Jayakarta	150.000.000,-
8.	PD. PK Tirtajaya	150.000.000,-
9.	PD. PK Pakisjaya	180.000.000,-
10.	PD. PK Kutawaluya	150.000.000,-

11.	PT. Bank Jabar Banten Cabang Karawang	2.000.000.000,-
12.	PDAM Karawang	500.000.000,-

**BAB V**  
**SUMBER DANA**

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD Kabupaten Karawang.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 03 Desember 2009

BUPATI KARAWANG,

TTD

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G ,

TTD

**ARIFIN H. KERTASAPUTRA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009

NOMOR : 13      SERI : A